

EKONOMI INDONESIA

Antara Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Realita

Sofyan Sulaiman

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

ians.iesc@gmail.com

Abstrak

Semenjak kemerdekaan Indonesia diploklamirkan, maka semenjak itu pula Indonesia menyatakan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Namun seiring berkembangnya zaman, kedaulatan dan kemandirian ini semakin tergeruskan oleh globalisasi. Terutama dibidang ekonomi. Sebagai negara agraris dengan iklim tropis yang bisa menanam disepanjang tahun tanpa dipengaruhi oleh musim namun ketahanan pangan Indonesia masih bergantung kepada asing. Sumber daya alam (SDA) dan Industri-industri strategis dominasi asing begitu terasa. Agar kedaulatan Indonesian ini terjaga dan kemandirian ini terbina maka tidak dapat tidak Indonesia harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila.

Kata Kunci: Kedaulatan Ekonomi, Kemandirian Ekonomi, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi

Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan lah kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno dan Muhammad Hatta. Pernyataan kemerdekaan ini merupakan pernyataan akan bebasnya Indonesia dari penjajahan, pernyataan akan kemandirian dan kedaulatan setelah dijajah oleh Belanda selama 350 Tahun dan Jepang

3,5 tahun. Namun setelah 73 tahun kemerdekaan itu semakin semu. Jika dulu Belanda melalui VOC menjajah Indonesia melalui pendudukan fisik dan militer yang menyebabkan Indonesia kehilangan kedaulatan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pertanahan. Sedangkan sekarang pendudukan secara fisik dan militer secara resmi sudah tidak kelihatan. Tetap sebagai bangsa kita telah kehilangan kemandirian, dan sampai batas cukup jauh, kita juga kehilangan kedaulatan ekonomi. Dalam banyak hal kita tergantung dan menggantungkan diri keadan asing.¹

Kedaulatan ekonomi digadaikan pada kekuatan asing sehingga menyebabkan melemahnya kedaulatan politik, diplomatik, pertahanan dan militer. Ini terlihat jelas dalam hampir setiap kebijakan demoestik dan kebijakan luar negeri indonesia selalu kelihatan pengaruh besar kepetingan asing yang melemahkan kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam era globalisasi yang mengalir deras, Indonesia telah terseret menjadi sekerad subordinat atau agen setia bagi kepentingan asing. Kekuatan-kekuatan korporasi telah mendikte bukan saja perekonomian nasional seperti kebijakan perdagangan, keuangan, perbankan, penanaman modal, pelayaran dan kepelabuhan, kehutanan, perkebunan, pertambangan migas dan non-migas, hingga kebijakan politik dan pertahanan.²

Indonesia sebuah negara yang besar, yang mempunyai anugerah sumber daya alam yang melimpah. Namun sumber daya alam yang begitu banyak itu tidak menjadi berkah bagi bangsa ini, bahkan rakyatnya jauh dari sejahtera. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan itu semua? Lalu bagaimana amanah konstitusi negara ini untuk mengelola dan mensejahterakan rakyatnya? Dalam artikel yang singkat ini, penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Amanah Undang-Undang Dasar 1945

Ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan disusun melalui “perencanaan pembangunan ekonomi.” Pada tahun 1947 didirikan

¹ Mohammad Amie Rais, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), h. 1-2.

² *Ibid.*

perencanaan dengan nama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi sebagai cikal bakal badan perencanaan, yang kemudian menjadi DEPERNAS dan kemudian secara permanen berubah menjadi BAPPENAS. Perencanaan pembangunan ekonomi berisi cita-cita masa depan perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, memperkuat kesatuan ekonomi nasional demin meingkatkan ketahanan nasional Indonesian. Untuk itulah konstitusi menetapkan secara imperatif: “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Perkataan “perekonomian disusun” artinya perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai selera dan kehendak pasar. Disinilah peran “perencanaan pembangunan ekonomi”.³

Para pendiri bangsa Indonesia mempersiapkan perekonomian yang bertumpu pada kesejahteraan sosial. Hal ini tampak pada undang-undang dasar Republik Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia menganut demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan yang kemudian disebut dengan Ekonomi Pancasila, karena sistem ini lahir dari nilai luhur Bangsa Indonesia.

Pada pembukaan undang-undang dinyatakan “*kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa*”. Pernyataan ini adalah pernyataan kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia untuk mengelola bangsanya termasuk untuk mengelola potensi ekonominya. Pernyataan “*penjajahan di atas dunia harus dihapuskan*” merupakan pernyataan terbebasnya Indonesia dari intervensi apapun dari bangsa lain, termasuk di dalamnya kedaulatan ekonomi. Tujuannya agar Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan serta rakyatnya mendapatkan keadilan dan kemakmuran di negaranya, dan melindungi bangsanya dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun ciri dari ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah (1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan

³ Sri Edi Swasono, *Ekspos Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cet. VI (Yogyakarta: Pustem UGM, 2017), h. 7.

moral; (2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan; (3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijakan ekonomi; (4) Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkret dari usaha bersama; (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antar perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.⁴

Sedangkan Sri-Edi Swasono mengungkap moralitas agama dan menggambarkan sistem ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila-sila pancasila. Berorientasi pada (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yaitu adanya atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme; (2) *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, yaitu tidak mengenal pemerasan antar sesama, pengisapan dan subordinasi ekonomi; (3) *Persatuan*, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, saling memajukan tidak saling mematikan – nasionalisme; (4) *kerakyatan*, yaitu demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan mengutamakan hidup orang banyak; (5) *Keadilan Sosial*, yaitu persamaan, pemerataan, kemakmuran rakyat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang.⁵

Dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 kemudian dirinci bagaimana hak-hak bangsa Indonesia, sistem ekonomi Indonesia dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut:

PASAL	BUNYI PASAL
Pasal 27 ayat 2	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 28D ayat 2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Pasal 28H ayat 2 dan 3	(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

⁴ *Ibid.*, h. 108.

⁵ *Ibid.*, h. 109.

	<p>lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.</p>
Pasal 33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
<i>Pasal 34</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari amanah undang-undang 1945 bisa dilihat bahwa Rakyat Indonesia dijamin kesejahteraanya, sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat sebesar-sebesaranya, dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun realitasnya berbeda, masih banyak orang-orang miskin, rakyat digaji dibawah standar kelayakan, jaminan sosial yang tidak menjamin, sumber daya alam

dikelola asing. Hal ini semua akibat pengelola bangsa ini mengkhianati amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Realitas Ekonomi: Cengkaraman Globalisasi

Globalisasi merupakan proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia dimana politik, ekonomi, budaya dan sosial semakin terjalin erat dan merupakan dunia dimana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Globalisasi sebagai liberalisasi, yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi terbuka dan tanpa batas dan juga globalisasi sebagai westernisasi, yakni merebaknya ke seluruh dunia struktur modernitas Barat yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokrastisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang sudah ada lebih dulu.⁶

Tiga pilar institusi yang menopang globalisasi sejak 1980-an adalah IMF, World Bank dan WTO (*World Trade Organization*) yang kemudian melahirkan Washington Consensus. Sekalipun banyak yang mengatakan bahwa Washington Consensus sudah melemah dan kehilangan relevansinya, namun rekomendasi-rekomendasi ekonominya masih diterima oleh negara-negara pengagumnya.⁷

Terdapat sepuluh rekomendasi ekonomi yang dikenal dengan Konsensus Washington:

1. Perdagangan bebas
2. Liberalisasi pasar modal
3. Nilai tukar mengambang
4. Angka bunga ditentukan pasar
5. Deregulasi pasar

⁶ Rais, *Selamatkan.....*, h. 11-14.

⁷ *Ibid.*, h. 15

6. Transfer aset dari sektor publik pada berbagai target pembangunan sosial
7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pengembangan sosial
8. Anggaran berimbang
9. Reformasi pajak
10. Perlindungan hak milik dan hak cipta

Pada dasarwarsa 1980-an dan 1990-an IMF, World Bank dan WTO dengan kebijakan-kebijakannya yang mengatur ekonomi dunia dengan mengacu pada Konsensus Washington itu terasa sungguh sakti. Seolah tidak ada satupun negara yang dapat menghindar dari magnet globalisasi.

Globalisasi dengan globalisme-nya terlanjur dikagumi oleh dunia ketiga termasuk oleh para elit di Indonesia, hal ini diperkuat dengan runtuhnya sosialis dan menguatnya kapitalis Barat dengan sistem pasar bebasnya. Sikap kaum elit ini kemudian menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kebangsaan dan kerakyatan yang melandasinya. Sistem ekonomi Indonesia semakin terdistorsi bahkan mengalami suatu pendangkalan. Pada akhirnya Globalisme ini melahirkan Imperealisme model baru dan Neo Kolonialisme.

Mahathir Muhammad Perdana Menteri Malaysia pada 3 Mei 2006 di Jakarta dalam pidatonya di depan *the Asia HRD Congress* mengingatkan perkataan Presiden Sukarno disaat para elit bangsa ini lupa dengan peringatan pendiri bangsanya. Mahathir mengatakan:

“Neokolonialisme bukanlah istilah khayalan yang diciptakan oleh Presiden Sukarno. Ia (neokolonialisme) itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada dibawah kontrol agen-agen yang dikendalikan oleh mantan penjajah kita.”⁸

Bung Karno juga memperingatkan, ekonomi Indonesia yang berawatak kolonial setidaknya-tidaknya memiliki tiga ciri sebagai berikut. **Pertama**, perekonomian Indonesia hanya diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju. **Kedua**, perekonomian

⁸ *Ibid.*, h. 19.

Indonesia cenderung dimanfaatkan sebagai pasar barang-barang jadi yang dibuat oleh negara-negara industri maju itu. Dan *ketiga*, perekonomian Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan kaputal yang terdapat di negara-dinegara industri maju tersebut.⁹ Namun peringatan Sukarno ini diabaikan oleh elit bangsa ini.

Mengapa globalisasi ini dikatan dengan imperialisme ekonomi atau neokolonialisme? Sebagaimana diketahui imperealism dan kolonialisme tempo *doeloe* bercirikan tiga hal. *Pertama*, ada kesenjangan kemakmuran antara negara penjajah dan negara terjajah. *Kedua*, hubungan kaum penjajah dan terjajah adalah hubungan eksploratif atau bersifat menindas. Dan *ketiga*, negara terjajah, sebagai pihak yang lemah, kehilangan kedaulatan dalam arti yang luas.¹⁰

Bila dicermati kesenjangan negara kaya dan negara miskin, juga antara kelas kaya dan kelas miskin dalam sebuah negara, cenderung makin menganga lebar. Di akhir dasawarsan 1990-an memasuki abad dua puluh satu, 20 persen penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara-negara maju menikmati 86 % penghasilan dunia, sedangkan 20 % plaing bawah hanya mendapatkan 1 persen penghasilan dunia. 1,3 milyar atau 1/6 penduduk dunia berpenghasilan kurang dari satu dolar sehari.¹¹

Hubungan ekonomi yang eksploratif dalam globalisasi tampak jelas di Indonesia. Seperti upah buruh yang rendah untuk menekan laju inflasi, privatisasi BUMN, menghapus tarif dan kuota agar barang bisa bergerak bebas menerobos batas-batas negara, memprioritaskan barang-barang ekspor, membuka seluruh bidang ekonomi bagi kepemilikan asing, hingga serbuan tenaga kerja asing ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kran pasar bebas dibuka sementara bangsa ini belum siap.

Negara-negara berkembang cenderung kalah dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas. Disaat negara-negara maju memproteksi

⁹ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 7.

¹⁰ Rais, *Selamatkan....*, h. 20.

¹¹ *Ibid.*, h. 21.

petani mereka dengan dana besar sehingga produk-produk negara berkembang susah masuk. Sementara negara-negara berkembang sendiri terus ditekan agar membuka pasar mereka tanpa batas. Negara-negara maji itu seolah menyatakan “pasar dan perdagangan bebas untuk anda, bukan untuk saya”. Indonesia pernah tunduk pada WTO untuk menerima impor paha ayam dari AS sehingga peternak ayam dalam negeri banyak yang gulung tikar. Demikian juga Indonesia membuka impor gula, garam, tekstil, hingga beras disaat petani menghadapi panen raya, sehingga merugikan rakyat Indonesia sendiri.¹²

Contoh lainnya, dalam kasus Blok Cepu, para Sarjanawan Geologi Indonesia mengatakan mampu mengelolanya, bahkan Pertamina menyatakan sanggup mengelolanya. Namun penguasa ketika itu, SBY, menyerahkan kepada Exxon Mobile untuk mengelolanya, hal ini melihatkan ketidakberdayaan pemerintah terhadap tekanan Amerika Serikat.¹³ Dalam kesempatan lain, penulis menghadiri seminar yang digagas oleh Pertamina, dengan tema “Pertamina Untuk Negeri” di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2012, pembicara dari Pertamina mengatakan bahwa Pertamina sanggup untuk mengelola blok Cepu termasuk blok Natuna, namun pemerintah menyerahkannya kepada Exxon Mobile, padahal disaat yang sama pemerintah Aljazair melakukan kontrak dengan Pertamina untuk melakukan eksplorasi minyak di negaranya. Sesuatu yang sangat ironi, dipercaya oleh negara lain namun tersingkir di negeri sendiri. Hal ini lah yang dikatakan oleh Amin Rais “Sikap konyol Indonesia itu jarang tertandingi oleh negara lain”.

Kemudian para elit begitu ramah (*market friendly*) terhadap pasar bebas. Siapakah pasar tersebut? Sri-Edi Swasono mengatakan ada empat kelompok dalam pasar, yaitu: (1) kelompok penyandang dana, para penerima titipan dana dari luar negeri (komprador), termasuk para penyamun dana publik, singkatnya para financial tycoons atau para

¹² *Ibid.*, h. 24

¹³ Marwan Batu Bara, dkk., *Tragedi & Ironi Blok Cepu: Nasionalisem yang Tergadai* (Jakarta: IRESS, 2011), h. 109.

taoke dana; (2) para penguasa stok barang (termasuk para penimbun dan pengijon); (3) para spekulasi (baik di pasar umum dan pasar modal) dst; dan yang terakhir adalah (4) rakyat awam yang tenaga belinya lemah bukan penguasa pasar. Ramah kepada pasar pada dasarnya adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama pasar, yang merupakan kelompok penguasa pasar, penentu pasar dan penyandang dana.¹⁴ Celaknya, negara-negara yang begitu ramah terhadap pasar bebas justru mengalami kemunduran sosial dan ekonomi.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia yang kaya dengan sumber daya alamnya justru gagal membangun kemakmuran, seolah kekayaan tersebut menjadi sebuah kutukan? Mengapa para elit begitu kerasan, begitu merasa “*at home*” dengan penjajahan ekonomi ini? Jawabannya adalah, *pertama*, para elit nasional yang bermental *Inlander*.¹⁵ Negara berkembang yang mudah dijadikan sebagai negara komprador, negara subordinat, atau negara pelayan kepentingan kapitalisme internasional adalah negara yang para pemimpinnya masih menderita penjajahan mental atau bermental *inlander*. Selama kolonialisasi mental itu tetap kuat bercokol di benak suatu bangsa dan para pemimpinnya, selama itu pula sulit diharapkan bangsa tersebut betul-betul dapat memelihara kemerdekaan dan kedaulatannya. Dengan kata lain, suatu negara berkembang bisa terlepas dari cengkraman kapitalisme internasional ketika ia mampu membuang penyakit dari dalam dirinya seperti mentalitas terjajah, merasa inferior, perasaan rendah diri serta penyakit selalu kalah yang pada akhirnya membuahkan kehilangan kepercayaan diri.¹⁶

Di bawah ini bisa dilihat pemimpin Dunia Ketiga yang sudah melepaskan diri dari mentalitas terjajah. Dr. Mahathir Muhammad,

¹⁴ Swasono, *Ekspos....*, h. 62.

¹⁵ Secara harfiah “*inlander*” berarti pribumi atau anak negeri. Pada zaman penjajahan istilah *inlander* digunakan secara sinis-sarkastik buat anak-anak bangsa yang penakut, merasa inferior di depan penjajah Belanda, selalu jadi pecundang serba “*nrimo*”, bodoh, potongan dan jahitannya memang pantas dijajah dan dihina.

¹⁶ Rais, *Selamatkan....*, h. 138-139.

ketika Malaysia dihantam krisis moneter 1997 bersama Korea Selatan, Thailand, Indonesia, dan Filipina, semua negara terjun bebas secara moneter. Semua negara menerima bantuan IMF dengan kadar berlainan, kecuali Malaysia. Mahathir tidak berminat sama sekali menggandeng IMF. Ia tantang habis ortodoksi IMF dan seluruh resepnya ia lawan. Tidak ada modal model SAP (*Structural Adjustment Program*),¹⁷ ringgit Malaysia tidak diibandingkan vis-a-vis dolar, tidak ada pencabutan subsidi untuk rakyat sendiri. Dan proses pembangunan tidak ada yang berhenti. Karena menolak IMF, Mahathir dicibir dan ditakut-takuti oleh Asing. George Soros menyebutkan Mahathir sebagai bahaya masyarkat dan ancaman buat negerinya sendiri. Semua pengamat ekonomi memprediksi Malaysia bakal hancur. Ternyata Mahathir benar, IMF keliru. Dengan mewalan resep dukun ekonomi, IMF, Malaysia justru makin mantap dan kuat. Penghasilan Malaysia melonjak tiga kali lipat dan kemiskinan menurun menjadi 5% dari jumlah penduduk yang sebelumnya mencapai 25%.¹⁸ Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ternyata negara yang mengalami kemajuan pesat adalah negara yang mempunyai pemimpin bermental bebas, merdeka, berdaulat dan mandiri serta percaya diri.

Penyebab *kedua* adalah para elit bangsa terkena perangkap para kapitalis internasional. Jhon Perkins, melalui bukunya *Confessions of an Economic Hit Man* mengatakan:

Pada akhirnya, para pemimpin itu akan terjerembab didalam belitan utang akan memastikan loyalitas mereka. Kita dapat memanfaatkan mereka kapan pun kita mau – untuk memenuhi kebutuhan politik, ekonomi, atau militer kita. Sebaliknya,

¹⁷ SAP (*Struktural Adjustment Program*) merupakan arahan-arahan yang diberikan IMF. Jika negara-negara berkembang ingin mendapatkan bantuan hutang. SAP ini didiktekan secara sepihak oleh IMF. Arahan tersebut seperti, mengurangi defisit anggaran dengan menaikkan pajak, meningkatkan harga pangan untuk memangkas beban subsidi, peningkatan harga pelayanan masyarakat, pemotongan upah, liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, membuka selebar-lebarnya korporasi asing masuk. Pada intinya SAP ini adalah jebakan utang IMF. Dalam kasus Indonesia, banyak industri-industri strategis mati dan BUMN di privatisasi. Sebagai contoh PT.DI yang mati suri, privatisasi Indosat, penjualan sebagian saham Telkomsel, dll.

¹⁸ *Ibid.*, h. 139-141.

mereka memperkuat posisi politis mereka dengan membawa kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, dan bandar udara kepada rakyat mereka. Para pemilik perusahaan rekayasa/konstruksi Amerika Serikat akan menjadi luar biasa kaya.¹⁹

Kemudian Perkins menyebutkan salah satu targetnya adalah Indonesia. Pada tahun 1971 Perkins datang ke Indonesia dan dia harus bisa meyakinkan bahwa dengan paket-paket kebijakan yang ditawarkan oleh EHM (*Economic Hit Man*) akan membuat ekonomi di negeri ini akan melesat jauh. Tujuannya, agar Indonesia bisa melayani Washington sebagaimana Shah Iran.²⁰ Perkins menyadari bahwa elit-elit Indonesia pada dasarnya tidak suka akan kehadirannya, bahkan terlihat marah ketika bertemu dengannya, seolah dia datang sebagai seorang pengganggu. Lebih lanjut Perkins mengatakan:

Namun, makin banyak waktu kuhaiskan bersama orang-orang ini, makin yakin aku jadinya bahwa aku seorang pengganggu, bahwa suatu perintah untuk bekerja sama telah diturunkan dari seorang, dan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan selain mematuhi. Aku sama sekali tidak tahu apakah seorang pejabat pemerintah, seorang bankir, seorang jenderal, atau kedutaan Amerika Serikatlah yang telah mengirimkan perintah itu. Yang kutahu adalah bahwa walaupun mereka mengundang aku ke dalam kantor mereka, menawari aku teh, dengan sopan menjawab pertanyaanku, dan dengan cara yang jelas tampak menyambut kehadiranku, di bawah permukaan itu ada bayang-bayang kepasrahan dan kebencian.²¹

¹⁹ Jhon Perkins, *Conversions of an Economic Hit Man: Pengakuan Seorang Ekonomi Perusak*, diterjemahkan oleh Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani (Jakarta: Abdi Tandur, 2005), h. x.

²⁰ *Ibid.*, h. 23. Dalam pengakuannya Perkins menyebutkan akan berakibat fatal jika pemerintah menolak paket kebijakan yang ditawarkan oleh EHM. Sebagai contoh Jaime Roldos, Presiden Ekuador, dan Omar Torrijos, Presiden Panama keduanya tewas dalam kecelakaan. Kematian mereka bukanlah kebetulan. Mereka dibunuh karena mereka menolak uluran tangan persaudaraan korporat, pemerintah dan pimpinan perbankan yang memiliki tujuan secara global. EHM gagal meyakinkan Roldos dan Torrijos, maka serigala-serigala lain masuk yang didukung oleh CIA yang selalu berada dibelakang EHM.

²¹ *Ibid.*, h. 44.

Jika kita cermati kebijakan pemerintah, dari Presiden Suharto hingga Presiden Jokowi, maka bisa dipastikan pengakuan Perkins ini benar. Kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para presiden tersebut. Misal, Suharto lah yang pertama kali mengesahkan UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967, yang kemudian berdirilah PT. Freeport Sulphur di Papua. Megawati melakukan privatisasi beberapa BUMN, kemudian dilanjutkan oleh SBY dengan menyerahkan SDA asing, yang kebanyakan kepada Amerika, dan Jokowi yang banyak melakukan utang dan pejualan aset negara seperti Gelora Bung Karno, beberapa jalan tol, dll.

Agenda Kedepan: Menegaskan Kembali Kedaulatan Ekonomi

Ada pesan yang sangat indah dari plokmatör bangsa ini, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Sikap Bung Karno sangat membatasi eksploitasi sumberdaya alam oleh asing. Beliau mengatakan, “Kita simpan di tanah sampai para insinyur kita mampu menggarap sendiri,” sementara Bung Hatta mengatakan, “ Saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam di laut daripada dijajah tuan-tuan”²² Pesan proklamator tersebut terwujud dalam Pasal 33 UUD 1945. Walaupun jiwa dari pasal “asas kekeluargaan” sempat ingin dihilangkan oleh Sjahrir, Sri Mulyani, Bambang Soedibyo, dan Didie J. Rachbini ketika amandemen tahun 2002 namun berhasil ditentang oleh Mubyarto.²³ Bahkan menurut Sri-Edi Swasono ketika penulis mengikuti perkuliahannya di Pusat Ekonomi Kerakyatan UGM pada tahun 2012, mereka ingin menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara mempunyai hak sebesar-besarnya untuk mengatur SDA, termasuk menyerahkannya kepada asing. Namun tafsiran mereka ini dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tafsiran konstitusi itu otoritasnya MK. Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

²² Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kompas, 2008), h. 184.

²³ Sri-Edi Swasono, *Ke-Indonesia-an, Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: UST Press, 2015), h. 157.

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasi oleh Negara. Kala tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Pertanyaannya, tindakan apa yang harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila? Revrisond Baswir merumuskan ada sepuluh agenda politik ekonomi kerakyatan yang harus dijalankan, yaitu:²⁵

Pertama, menyusun arsitektur tata kelola keuangan negara yang baik, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan untuk memastikan pemanfaatan belanja negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, melakukan renegotiasi pembayaran dan memperjuangkan penghapusan sebagian utang luar negeri Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara dan neraca pembayaran. Penghapusan utang luar negeri terutama perlu dilakukan terhadap utang luar negeri yang tergolong sebagai “utang najis”, yaitu utang luar negeri yang proses pembuatannya sarat dengan manipulasi para kreditur, sedangkan pemanfaatannya cenderung diselewengkan

²⁴ *Ibid.*, h. 169.

²⁵ Baswir, *Manifesto*...., h. 130-142.

oleh para pejabat yang berkuasa untuk memperkaya diri mereka sendiri. Selanjutnya, pembuatan utang luar negeri baru harus dihentikan, sebab selama ini utang luar negeri lebih banyak ditujukan untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan untuk berbagai proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing. Selain tidak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, jebakan utang membuat perekonomian semakin terperosok.

Ketiga, merenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia dengan para kontraktor asing, karena kontrak pertambangan semenjak era Suharto hingga sekarang tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi karena didikte oleh para kontraktor asing, maka hal itu mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Keempat, mengkaji ulang penerapan rezim kurs mengambang dan rezim devisa bebas, serta menyusun ulang arsitektur perbankan nasional.

Kelima, mengotonomkan dan mendemokratisasikan penyelenggaraan BUMN. Karena pengelolaan BUMN selama ini cenderung didominasi oleh para pejabat pemerintah pusat. Dominasi para pejabat pemerintah ini tidak hanya berakibat pada buruknya kualitas pelayanan BUMN, tetapi berdampak berubahnya BUMN menjadi objek sapi perah para penguasa. Belajar dari Malaysia dan Singapura, BUMN dibentuk Holding Company.

Keenam, melindungi dan memajukan hak-hak dasar para pekerja seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan 28D ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ketujuh, melakukan reforma agraria, yaitu menegakkan kedaulatan rakyat dalam tata kelola agraria demi terwujudnya keadilan agraria dalam arti yang sesungguhnya. Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Pembaharuan Agraria (UUPA) 1960, negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan lahan pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedelapan, memperkuat perekonomian rakyat melalui pengembangan koperasi. **Kesembilan**, mengembangkan dan memperkuat pasar domestik.

Kesepuluh, mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 34 UUD 1945.

Kesepuluh agenda tersebut tentu harus dijalankan agar bangsa ini bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya, bukan hanya sebagai wacana apalagi sebagai pemanis saat kampanye politik, namun dengan sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kesimpulan

Globalisasi ekonomi dengan segala implikasinya, seperti politik, ekologi, dan sosiologi direkaya oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme Barat. Berbagai mantra globalisasi seperti perdagangan bebas, deregulasi pasar, privatisasi BUMN, liberalisasi pasar modal, nilai tukar mengambang dan lain sebagainya, pada dasarnya tidak dapat menyembunyikan tujuan pokoknya. Tujuan pokok tersebut untuk memelihara hegemoni Barat atas negara-negara berkembang. Sebagai akibatnya negara-negara berkembang tidak pernah berkembang secara kualitas, namun stagnan bahkan mengalami kemunduran. Indonesia sebagai negara bekas jajahan bukan berarti harus tunduk terhadap penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh imperialis Barat. Karena pernyataan kemerdekaan itu merupakan pernyataan kedaulatan dan kemandirian, baik secara politik maupun ekonomi.

Untuk bebas dari belenggu globalisasi ekonomi tersebut, Indonesia perlu menegaskan kembali ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila. Sehingga, potensi-potensi ekonomi yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, bukan untuk kepentingan oligarki.
Wallahu A'lam

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Batubara, Marwan, dkk. 2011. *Tragedi & Ironi Blok Ceput: Nasionalisem yang Tergadai*, Jakarta: IRESS.
- Kwik Kian Gie. 2008. *Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kompas.
- Perkins, Jhon. 2005. *Convensions of an Economic Hit Man: Pengakuan Seorang Ekonomi Perusak*, diterjemahkan oleh Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani, Jakarta: Abdi Tandur.
- Rais, Mohammad Amin. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*, Yogyakarta: PPSK Press.
- Sri-Edi Swasono. 2015. *Ke-Indonesia-an, Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: UST Press.
- _____. 2017. *Ekspos Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustem UGM.

